

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini membahas tentang suatu perjanjian kerja dalam pemagangan yang tidak mengatur adanya besaran uang saku terhadap perjanjian pemagangan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pemagang dan pengusaha. Dalam hal ini terdapat salah satu hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dalam Negeri. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah Keabsahan perjanjian pemagangan tanpa menyertakan suatu besaran uang saku dan Upaya hukum pemagang terhadap perjanjian pemagangan tanpa menyertakan besaran uang saku. Selanjutnya dalam pemagangan ini terjadi perselisihan industrial maka dapat di selesaikan melalui penyelesaian litigasi atau non-litigasi yang dapat ditarik lebih lanjut dengan bipartite, mediasi, arbitrase, serta Pengadilan Industrial

Kata kunci: Program Pemagangan, Keabsahan Perjanjian, Upaya Hukum.

ABSTRACT

In writing this thesis discusses work agreements in apprenticeships that do not regulate the amount of allowances in apprenticeship agreements involving both parties, namely apprenticeships and employers. In this case there is one of the rights as regulated in Act Number 13 of 2003 concerning Manpower and Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Domestic Administration. The formulation of the problem contained in this thesis is the validity of the apprenticeship agreement without including the amount of the allowance and the apprenticeship legal remedy for the apprenticeship agreement without including the amount of the allowance. Furthermore, in this internship there is an industrial dispute and can be resolved through litigation or non-litigation settlement which can be further withdrawn by bipartite, mediation, arbitration, and the Industrial Court

Keywords: Internship Program, Agreement Validity, Legal Recovery.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
(Tambahan Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4356)

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 1895)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 60).

Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan
Dalam Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 351)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 889K/Pdt.Sus-PH/2016.